

## **Membangun Nasionalisme Melalui Pembelajaran Geografi Berbasis Pengembangan Wilayah**

Oleh

**I Gede Astra Wesnawa**

**[gede\\_astrawesnawa@yahoo.co.id](mailto:gede_astrawesnawa@yahoo.co.id)**

### **Abstrak**

Geografi lingkungan sebagai ilmu pengetahuan memiliki objek kajian yang luas, mencakup fenomena geosfer di permukaan bumi yang terdiri dari atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer. Dalam hubungan ini wawasan geografi lingkungan sebagai pemberdayaan sumberdaya wilayah dalam bingkai ke Indonesiaan ketersediaan data dasar sumberdaya alam secara spasial belum optimal, sehingga membawa dampak pada pengenalan dan pemahaman terhadap keberadaan suatu wilayah, yang pada akhirnya terjadi degradasi nasionalisme. Geografi memiliki naluri ilmiah untuk mempelajari gejala geosfer secara utuh menyeluruh dengan menggunakan pendekatan keruangan, kelingkungan dan kewilayahan. Dengan bekal pengetahuan tentang karakteristik wilayah, merupakan modal dasar dalam membangun nasionalisme. perlu adanya penguatan internalisasi dan institusionalisasi pendidikan geografi. Penguatan tersebut memerlukan pengetahuan dan kearifan dalam mengatasi keterbatasan dan keangkuhan manusia dalam menyelaraskan dan menyingkap tabir alam. Inovasi dalam proses pembelajaran geografi dalam membangun nasionalisme meliputi: (1) kompetensi seperti pemahaman konsep geografi dan fenomena geosfer, mampu memanfaatkan peta dan berbagai citra penginderaan jauh dengan analisis dan sintesis data spasial, mampu mengenalkan karakteristik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) materi yang “membumi” dengan cara mengenalkan bentang alam secara berjenjang dari tingkat lingkungan sekitar, regional dan nasional dan materi yang bersifat dinamis, dan (3) model pembelajaran yang harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk pengenalan objek kajian secara langsung di lapangan dan pengenalan alat survei lapangan.

Kata kunci: Nasionalisme; pembelajaran geografi; pengembangan wilayah

### **A. Pendahuluan**

Geografi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai perkembangan peran yang dinamik dalam kehidupan manusia. Peran dinamik tersebut dapat ditelusuri dari tulisan Verstappen (2000), Sutikno (2001) yang menjelaskan bahwa beberapa ribu tahun sebelumnya, geografi lebih menekankan pada pemikiran tentang deskripsi daratan dan penduduknya untuk menyusun konsep filosofis, selanjutnya muncul abad penemuan yang berakar pada konsep baru tentang bentuk bumi dan kemajuan teknologi dalam navigasi dan perkapalan. Eksplorasi menjadi kata kunci pada periode tersebut dan kartografi mempunyai peran yang sangat penting.

Perkembangan selanjutnya geografi pada abad 19 yang diajarkan di universitas menunjukkan pergeseran peran ke arah mencari informasi tentang wilayah yang lebih luas/komprehensif melalui ekspedisi dan penelitian yang dilakukan masyarakat geografi.

Geografi memfokuskan interelasi spasial dan temporal antara gejala alami dan gejala sosial dan pengaruhnya terhadap sumberdaya dan lingkungan. Perkembangan tersebut berlangsung hingga abad 20 yang dicirikan oleh semakin kuatnya tekanan penduduk terhadap lingkungan alam yang dicirikan oleh eksploitasi sumberdaya yang tidak terkendali. Tahun 1950-an hingga 1980-an kajian geografis tentang penduduk dan lingkungan tersingkirkan ke pojok-pojok geografi sejarah dan geografi bentang alam kebudayaan yang sempit dan rapuh dalam ruang besar aliran utama geografi akademis (Dietz, 1998). Di era milenium ketiga, telah diketahui terdapat batas pertumbuhan dari sumberdaya alam. Sementara itu, sumberdaya tersebut juga tidak hanya dimanfaatkan generasi sekarang, tetapi juga akan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Untuk itu, perlu dibangkitkannya jatidiri geografi sebagai pemberdaya wilayah, sehingga mampu memecahkan isu-isu global tentang dampak dari semakin menipisnya ketersediaan sumberdaya, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, degradasi lingkungan, dan munculnya bencana alam diberbagai wilayah di muka bumi.

Perkembangan era kekinian, pembelajaran geografi dari dimensi keruangan (spatial) dan kewaktuan (temporal) menjadi tantangan dan peluang untuk memberdayakan sumberdaya wilayah, agar dapat dipergunakan manusia untuk kelangsungan hidupnya.

Persoalan mendasar dalam pengembangan wilayah adalah data potensi sumberdaya alam belum diketahui secara lengkap, sebaran keruangan yang tidak merata dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya alam yang tidak sebanding. Dalam hubungan geografi sebagai pemberdaya pengembangan wilayah dalam bingkai ke Indonesiaan belum tersedia data dasar sumberdaya alam secara spasial. Oleh karena tidak sepadannya ketersediaan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sumberdaya dan distribusi sumberdaya yang tidak merata, maka peluang bagi para akademisi, pendidik,

geografiwan dan insan pemerhati geografi untuk menyediakan data dasar potensi wilayah secara spasial.

Dalam mengelola sumberdaya yang bersifat dinamis dan kecenderungan pemerosotan kualitas maka dibutuhkan adanya strategi dalam pengelolaan. Sutikno (2002) menerapkan strategi pengelolaan sumberdaya yang meliputi: (1) mengutamakan sumberdaya yang dapat diperbaharui, (2) menghemat sumberdaya yang langka dan tidak terbaharui untuk menjaga keberlanjutannya, (3) kemampuan sumberdaya yang sedang dan akan menopang kehidupan perlu dijaga, sumberdaya yang telah mengalami kerusakan perlu direhabilitasi, dan (4) memberi nilai tinggi terhadap sumberdaya yang langka dan memberikan prioritas untuk penyelamatan dan perlindungan. Namun, dalam pengelolaan sumberdaya, selalu dihadapkan pada permasalahan perubahan, kompleksitas, ketidakpastian dan konflik (Mitchell, 2000). Perubahan lingkungan, sistem sosial, sistem ekonomi, budaya dan politik selalu mewarnai dalam pengelolaan sumberdaya wilayah. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks, sulit dipahami secara utuh, dan tidak dapat diprediksi. Lingkungan penuh dengan ketidakpastian, sering mengalami perubahan dan perubahan tersebut tidak dapat diramal. Konflik sering terjadi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah dan pengambilan keputusan. Pertentangan yang terjadi merupakan refleksi dari perbedaan ideologi, cara pandang, adat istiadat, kebudayaan, dan harapan masyarakat. Perubahan kompleksitas, ketidakpastian dan konflik yang muncul adalah akibat dari pengelolaan wilayah, maka pertanyaan yang muncul apakah nasionalisme dapat dibangun melalui pendidikan geografi berbasis pengembangan wilayah? Untuk itu, perlu dilakukan pengkajian, agar geografi tidak lagi menjadi mata pelajaran “*kelas dua*” karena dianggap tidak memiliki kontribusi yang nyata terhadap pemahaman tentang karakteristik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Konsep Pengembangan Wilayah**

Menurut Rustiadi (2006) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional, sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti, namun sering bersifat dinamis. Komponen-

komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey 1977 *dalam* Rustiadi 2006) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah homogen, (2) wilayah nodal, dan (3) wilayah perencanaan. Sejalan dengan klasifikasi tersebut, Glason (1974) *dalam* Tarigan (2006) berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan wilayah menjadi: (1) fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman, wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial politik. (2) fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional saling hubungan antar bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa kota yang saling berkaitan. (3) fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

Pengembangan wilayah merupakan upaya memberdayakan *stakeholders* di suatu wilayah dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi untuk memberi nilai tambah atas apa yang dimiliki oleh suatu wilayah fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian dalam jangka panjang pengembangan wilayah mempunyai target untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cara pencapaian bersandar pada kemampuan SDM dalam memanfaatkan lingkungan. Kajian pengembangan wilayah di Indonesia selama ini selalu didekati dari aspek sektoral dan aspek spasial. Pada aspek sektoral lebih menekankan pada ukuran dari aktivitas masyarakat suatu wilayah dalam mengelola sumberdaya wilayahnya. Kajian spasial menekankan pada arah dari kegiatan sektoral dimana sebaiknya lokasi kegiatan sektoral tersebut dibangun.

Pendekatan yang mengacu pada aspek sektoral dan spasial mendorong lahirnya konsep pengembangan wilayah yang mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung yang dimiliki suatu wilayah,

sehingga memberikan kesempatan pada sektor untuk berkembang tanpa menimbulkan konflik yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungan ini ada beberapa konsep pengembangan wilayah, yaitu: (1) konsep pusat pertumbuhan, (2) konsep integrasi fungsional dan (3) konsep pendekatan desentralisasi (Alkadri, 1999; Christtaller, Yunus, 2010). Konsep pusat pertumbuhan menekankan pada perlunya melakukan investasi secara besar-besaran pada pusat pertumbuhan atau wilayah yang telah mempunyai infrastruktur yang baik. Pengembangan wilayah di sekitar ini diharapkan melalui proses tetesan ke bawah (*trickle down effect*). Penerapan konsep ini di Indonesia telah melahirkan adanya 111 kawasan andalan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Konsep integrasi fungsional mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja di antara berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Konsepsi ini menempatkan suatu kota atau wilayah mempunyai hirarki sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota atau wilayah yang lain. Konsep desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar dari sumberdana dan sumberdaya manusia.

Konsep tersebut memiliki beberapa kelemahan, sehingga muncul beberapa konsep untuk menanggapi kelemahan tersebut, seperti konsep *people centre approach* yang menekankan pada pembangunan sumberdaya manusia, *natural resources based development* yang menekankan pada sumberdaya alam sebagai modal pembangunan, dan *technology based development* yang melihat teknologi sebagai kunci dari keberhasilan pembangunan wilayah. Kenyataan menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut belum berhasil untuk membawa kesejahteraan masyarakat.

Fenomena persaingan antar wilayah, kemajuan teknologi yang mengakibatkan dunia lebih dinamis, perubahan mendasar sistem kemasyarakatan seperti demokratisasi, otonomi, keterbukaan dan kreativitas masyarakat mendorong perubahan paradigma dalam pengembangan wilayah. Dengan semakin kompleksnya masalah tersebut dapat dibayangkan akan sulit mengelola sumberdaya secara terpusat sesuai dengan konsep yang dijelaskan sebelumnya. Pilihan yang paling tepat adalah memberikan kewenangan pada daerah yang lebih besar untuk mengelola pembangunan wilayahnya. Pembangunan ekonomi yang

hanya mengejar pertumbuhan tinggi dengan mengandalkan keunggulan komparatif berupa kekayaan alam berlimpah, upah murah atau yang dikenal *bubble economics*, sudah usang karena terbukti tidak tahan terhadap gelombang krisis. Walaupun teori keunggulan komparatif tersebut telah bermetamorfose dari hanya memperhitungkan faktor produksi menjadi berkembangnya kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter, ternyata daya saing tidak lagi terletak pada faktor tersebut (Alkadrie, 1999). Kenyataan menunjukkan bahwa daya saing dapat pula diperoleh dari kemampuan untuk melakukan perbaikan dan inovasi secara terus menerus.

Menurut Potter (1990) dalam Tiga Pilar Pengembangan Wilayah (1999) keunggulan komparatif telah dikalahkan oleh kemajuan teknologi, tetapi setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan khusus yang bukan didasarkan pada biaya produksi yang murah tetapi lebih dari itu adalah adanya inovasi untuk pembangunan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Barker (1997) *Paradigms: The understand the future in bussines and life* yang mengungkapkan adanya senjata trisula dalam menghadapi era global di abad 21, yaitu keunggulan komparatif, inovasi dan informasi.

Apabila dicermati maka paradigma pengembangan wilayah telah bergeser pada upaya yang mengandalkan tiga pilar yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi. Ketiga pilar tersebut merupakan elemen internal wilayah yang saling terkait dan berinteraksi membentuk satu sistem. Hasil interaksi elemen tersebut mencerminkan kinerja wilayah. Kinerja tersebut tentu akan berbeda dengan wilayah lainnya, sehingga mendorong adanya persaingan antar wilayah untuk menjadi pusat *spatial network* dari wilayah lain secara nasional dalam bingkai ke Indonesiaan. Namun, apabila salah dalam pengelolaan tidak mustahil akan melahirkan adanya disintegrasi sebagai satu kelemahan sistem. Untuk itu diperlukan kearifan dalam pengelolaan dengan mengedepankan keseimbangan pertumbuhan antar wilayah dengan penerapan insentif kepada wilayah yang kurang berkembang.

### **C. Membangun Nasionalisme Melalui Pembelajaran Geografi Berbasis Pengembangan Wilayah**

Bagaimana membangun nasionalisme? Geografi memiliki naluri ilmiah untuk mempelajari gejala geosfer secara utuh menyeluruh dengan menggunakan pendekatan keruangan, kelingkungan dan kewilayahan. Dengan bekal pengetahuan tentang karakteristik wilayah, merupakan modal dasar dalam membangun nasionalisme. Pendekatan yang menjadi ciri geografi merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk menjelaskan keanekaragaman bentang alam dan bentang budaya kewilayahan di Negera Kesatuan Republik Indonesia. Orientasi geografi telah berubah dari ilmu yang bersifat deskriptif menuju ilmu yang berusaha mencari hukum-hukum dan keteraturan berbagai fenomena alamiah maupun sosial kemanusiaan dengan bantuan teknik kuantifikasi. Dengan modal yang memadai yang dimiliki ilmu geografi seperti objek material dan objek formal, maka pertanyaan apakah mungkin pendidikan geografi digunakan untuk membangun nasionalisme? Jawabannya adalah "ya". Insan geografi harus berani melakukan inovasi dalam proses pembelajaran geografi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sutikno (2002); Affandi 2001; Matthews, et.al (2004) inovasi dapat dilakukan melalui kompetensi (kurikulum), materi dan model pembelajaran geografi.

Kajian geografis meliputi pengumpulan data, kompilasi data, representasi data dan analisis data. Perangkat yang digunakan untuk mengkaji sumberdaya wilayah adalah melalui teknik geografi. Hasil kajian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, data spasial dan temporal. Sehubungan dengan pendidikan geografi untuk membangun nasionalisme, maka diperlukan wawasan sebagai berikut: (1) inventarisasi sumberdaya wilayah, yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya binaan yang tersaji dalam bentuk data spasial dan temporal. Data tersebut digunakan dalam analisis kompleks wilayah untuk menjelaskan bagaimana hubungan antarwilayah, sehingga distribusi sumberdaya dapat menyebar sesuai dengan karakteristik kewilayahan; (2) penjelasan tentang sumberdaya wilayah yang memberikan kelengkapan informasi data spasial yang tidak dapat diwujudkan dalam data spasial; (3) evaluasi sumberdaya wilayah

tentang potensi dan kemampuan untuk mendukung kehidupan, sehingga evaluasi diarahkan untuk mengetahui kemampuan dan kesesuaian sumberdaya wilayah untuk tujuan tertentu; (4) sumberdaya wilayah bersifat dinamik, sehingga perlu data yang akurat dan terkini. Untuk itu, pemantauan terhadap sumberdaya wilayah merupakan suatu keharusan. Karakteristik sumberdaya wilayah itu bervariasi, sehingga dibutuhkan teknik-teknik untuk pemantauannya; (5) dampak akibat perubahan sumberdaya wilayah yang diakibatkan oleh alam maupun aktivitas manusia dapat dianalisis melalui hubungan manusia dan lingkungan sebagai domain geografi.

Pembangunan berbasis geografi dapat memberikan konsep keseimbangan lingkungan, ekonomi, sosial budaya yang lebih menguntungkan bagi kehidupan masyarakat era ke depan. Pengelolaan sumberdaya wilayah secara arif dan bijaksana yang dikelola berdasarkan daya dukung lingkungan serta resiko kemungkinan terjadinya bencana dan memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Pengelolaan sumberdaya yang diserasikan dengan nilai sosial budaya lokal dapat menyelamatkan perubahan yang drastis dari lingkungan. Pembangunan wilayah untuk kesejahteraan harus mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ekosistemnya.

Tersedianya data spasial tentang potensi sumberdaya wilayah dengan pemanfaatan berbasis pada ekosistem, yang meliputi wilayah nasional maupun wilayah provinsi dan kabupaten sesuai skala kebutuhan. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya wilayah yang tumpang tindih akan dapat diminimalisir. Selanjutnya, informasi spasial tentang sumberdaya wilayah dapat diakses oleh masyarakat, pengambil kebijakan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang ada di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah maupun swasta.

Dengan adanya infrastruktur data spasial nasional (IDSN) dan infrastruktur data spasial daerah (IDSD) yang dilengkapi dengan sistem informasi geografi yang efektif dan efisien dapat memberdayakan sumberdaya wilayah yang pada akhirnya dapat mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat. Adapun strategi yang ditempuh untuk percepatan tersebut adalah sebagai berikut: (a) penyelenggaraan pemetaan dasar sumberdaya wilayah, (b) standarisasi data

spasial utama, (c) Pendidikan dan latihan dalam penerapan Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh, (d) Pendidikan dan pelatihan tentang potensi wilayah, neraca sumberdaya alam, batas wilayah, inventarisasi nama-nama geografis dan kajian wilayah.

Untuk mendukung pembangunan wilayah, maka dukungan data spasial sangat diperlukan. Data spasial memiliki kemampuan untuk pemodelan perubahan pembangunan di suatu wilayah. Membuat respon terhadap dinamika wilayah yang cepat. Menggambarkan keterkaitan antar berbagai aspek kewilayahan dalam hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan pada aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial budaya secara spasial dan memberi peluang untuk investasi dan pengembangan wilayah.

Selanjutnya menyimak perspektif pendidikan geografi, ruang adalah sebuah sistem yang saling berhubungan, dialogis, majemuk dan modifikatif. Setiap bagian dunia pada skala mikro akan terlihat sebagai sistem yang terbuka, sehingga akan siap mengantisipasi perubahan zaman. Dengan kata lain perspektif geografi memandang arah perkembangan dunia tidak semata-mata bergerak ke satu arah. Skenario masa depan dunia akan berjalan tak terduga dan penuh kemungkinan, ketidakpastian, kompleksitas dan perubahan, sehingga diperlukan perubahan *mind set* untuk memahami dunia dengan perubahan kekinianannya. Sehubungan dengan hal tersebut, kompetensi dan strategi pembangunan harus mampu menghadapi perubahan, kompleksitas dan ketidakpastian. Pendekatan yang bersifat terpisah secara sektoral tidak akan mampu merumuskan kompleksitas perkembangan dunia, karena model masa depan dunia hanya dapat dibangun dan dianalisis melalui pemahaman akan geografi sebagai sebuah totalitas. Agar dapat keluar dari persoalan pembangunan tidak ada pilihan lain kecuali kita memberanikan diri menantang paradigma lama yang bersifat profitabilitas menuju ke paradigma keberlanjutan, pertumbuhan dialihkan dengan keseimbangan, efisiensi lingkungan harus lebih dikedepankan dari efisiensi teknis, dan mendominasi alam harus digeser ke paradigma harmonisasi dengan alam (Astra, 2009). Untuk itu, perlu adanya penguatan internalisasi dan institusionalisasi pendidikan geografi. Penguatan tersebut memerlukan pengetahuan dan kearifan dalam mengatasi

keterbatasan dan keangkuhan manusia dalam menyelaraskan dan menyingkap tabir alam.

Inovasi dalam proses pembelajaran geografi dalam membangun nasionalisme meliputi: (1) kompetensi seperti pemahaman konsep geografi dan fenomena geosfer, mampu memanfaatkan peta dan berbagai citra penginderaan jauh dengan analisis dan sintesis data spasial, mampu mengenalkan karakteristik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) materi yang “membumi” dengan cara mengenalkan bentang alam secara berjenjang dari tingkat lingkungan sekitar, regional dan nasional dan materi yang bersifat dinamis, dan (3) model pembelajaran yang harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk pengenalan objek kajian secara langsung di lapangan dan pengenalan alat survei lapangan.

Konsekuensi selanjutnya dari pergeseran paradigma adalah perlunya merubah perencanaan pengembangan wilayah dari pendekatan diskrit menuju pada pendekatan kontinum. Pola perencanaan diskrit yang terwujud sekat-sekat wilayah administrasi justru menimbulkan kontraproduktif karena setiap wilayah berusaha menonjolkan diri. Euforia kekuasaan pada masing wilayah mengikis prinsip geografi yang mengutamakan distribusi, deskripsi, interelasi dan korologi dan konsep inti geografi yang meliputi: ruang (*space*) tempat (*place*), lingkungan (*environment*) dan peta (*map*) sebagai jati diri geografi yang dikemukakan oleh Matthews et.al (2004). Sebaliknya pendekatan kontinum setiap wilayah akan dipandang sebagai bagian integral dan totalitas ekologis, sehingga aspek spasial seperti desa-kota tidak lagi diposisikan secara berlawanan, namun menunjukkan adanya interaksi yang tidak terpisahkan. Kehadiran karakter wilayah yang berbeda memunculkan karakter kontemporer. Pemahaman karakteristik wilayah dalam bingkai ke Indonesiaan dapat membangun nasionalisme.

#### **D. Penutup**

Geografi lingkungan sebagai ilmu pengetahuan memiliki objek kajian yang luas, mencakup fenomena geosfer di permukaan bumi yang terdiri dari atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer. Dalam hubungan ini wawasan geografi lingkungan sebagai pemberdayaan sumberdaya wilayah dalam bingkai ke

Indonesiaan ketersediaan data dasar sumberdaya alam secara spasial belum optimal, sehingga membawa dampak pada pengenalan dan pemahaman terhadap keberadaan suatu wilayah, yang pada akhirnya terjadi degradasi nasionalisme. Geografi memiliki naluri ilmiah untuk mempelajari gejala geosfer secara utuh menyeluruh dengan menggunakan pendekatan keruangan, kelingkungan dan kewilayahan. Dengan bekal pengetahuan tentang karakteristik wilayah, merupakan modal dasar dalam membangun nasionalisme. perlu adanya penguatan internalisasi dan institusionalisasi pendidikan geografi. Penguatan tersebut memerlukan pengetahuan dan kearifan dalam mengatasi keterbatasan dan keangkuhan manusia dalam menyelaraskan dan menyingkap tabir alam.

Inovasi dalam proses pembelajaran geografi dalam membangun nasionalisme meliputi: (1) kompetensi seperti pemahaman konsep geografi dan fenomena geosfer, mampu memanfaatkan peta dan berbagai citra penginderaan jauh dengan analisis dan sintesis data spasial, mampu mengenalkan karakteristik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) materi yang “membumi” dengan cara mengenalkan bentang alam secara berjenjang dari tingkat lingkungan sekitar, regional dan nasional dan materi yang bersifat dinamis, dan (3) model pembelajaran yang harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk pengenalan objek kajian secara langsung di lapangan dan pengenalan alat survei lapangan.

### PUSTAKA ACUAN

- Alkadrie. 1999. Tiga Pilar Pengembangan Wilayah. BPPT: Jakarta.
- Anonim, 2006. <http://www.schoomap.dikmenjur.net>
- Astra Wesnawa, I Gede. 2009. Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Melalui Peningkatan Wawasan dalam Pembelajaran Geografi. Media Komunikasi FIS Vol. 8 NO. 3, Desember 2009. hal. 49-59.
- Astra Wesnawa, I Gede. 2010. Dinamika Pemanfaatan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Penelitian Geografi Forum Geografi UMS Vol. 24 NO. 1 Juli 2010 hal. 1-11.*
- Astra Wesnawa, I Gede. 2010. Penerapan Konsep Tri Hita Karana Dalam Lingkungan permukiman Perdesaan (Kasus Kabupaten Badung Provinsi Bali). *Bumi Lestari Jurnal Lingkungan Hidup (Journal of Environment) Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana. ISSN 1411-9668 Vol.10 No.2, Agustus 2010. Hal 295-301.*
- Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1989. *Metode Analisa Geografi*. LP3ES Jakarta.

- BKTRN (1997), *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*, PP No.47 Tahun 1997.
- Dietz, Ton. 1995. Hak Atas sumberdaya alam. Terjemahan dari *Entitlements to Natural Resources Countours of Political Environmental Geography* oleh Roem Topatimasang. kerjasama Pustaka Pelajar, Isist Press dan REMDEC, Jakarta.
- Dikshit, R.D., 2000. *Political Geography: The Spatiality of Politics*. Third Edition. Tata McGraw Hill Publishing Company Limited, New Delhi.
- Hadi S. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hadi Sabari Yunus, 2005. *Pendekatan Utama Geografi, Acuan Khusus Pendekatan keruangan, Ekologis dan Komplek Wilayah*. Ceramah Studium general, Jurusan Geografi FIS UNNES, Semarang 20 Maret 2005.
- Hafid Setiadi. 2007. Pembangunan Wilayah: Gagasan Ruang Ekologis dan Pembangunan Berkelanjutan. *Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pembangunan Wilayah berbasis Lingkungan di Indonesia. 27 Oktober 2007 di Yogyakarta*.
- Katili, J.A. 1983. *Sumberdaya Alam untuk Pembangunan Nasional*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Keraf, A. Sonny. 2005. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Matindas Rudolf W., Aris Poniman Kertopermono, Sukendra Martha. 2008. Urgensi Perencanaan Spasial Untuk Mendukung Pembangunan Wilayah Berwawasan Lingkungan: Minimasi Pemansan Global. Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan geografi Indonesia XI. Padang 22 Nopember 2008.
- Matthews J.A, D.T Herbert. 2004. *Unifying Geography Common Heritage Share Future*. London Routlege Taylor& Francis Group.
- Mitchell, Bruce; B. Setiawan, Dwita Hadi Ratmi. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gadjah Mada Press: Yogyakarta.
- Muta'ali, Lufti. 2005. Pengembangan Wilayah dan Penataan ruang di Indonesia: Tinjauan teoritis dan Praktis Bahan Kuliah PPW. PPS UGM: Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).
- Porter. 1998. *Summary Brief: A Case Analysis of Porter's Cluster Theory in the Amish Furniture Industry, Florida State University*.
- Setiawan, Bakti. 2006. *Pembangunan Berkelanjutan dan Kearifan Lingkungan : dari Ide ke Gerakan*, dalam Kearifan Lingkungan Untuk Indonesiaku, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa.
- Sutikno. 2002. Peran Geografi Sebagai Pemberdayaan Sumberdaya Wilayah, *Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IKatan Geograf Indonesia di Bandung 28-29 Oktober 2002*.
- Verstappen, H.Th. 2002. *The Challenges of Geography on Threshold of The Third Millenium and The Role of Geomorphology*. ITC: Enchede The Netherlands.